



**Pengembangan Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat: Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Di Kecamatan Rantau Selatan**

Nasrullah Hidayat*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2016; Disetujui Oktober 2016; Dipublikasikan Desember 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas BKM yang diukur melalui kajian pengembangan kapasitas BKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu mengkombinasikan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Rantau Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 4 dari 9 BKM tidak optimal melaksanakan PNPM MP jika dilihat dari pengembangan kapasitas kelembagaan dan kapasitas individu. Sementara itu variabel yang paling mempengaruhi ketercapaian keberhasilan pelaksanaan PNPM MP dan kapasitas BKM adalah sarana dan prasarana, kepemimpinan, perilaku dan etika. Salah satu ketercapaian keberhasilan tersebut dilihat dari kegiatan ekonomi bergulir. Ketercapaian keberhasilan ini ditunjukkan oleh BKM Maju Bersama, BKM Karya Mufakat, BKM Anugerah, BKM Sejahtera dan BKM Perdana Sejahtera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas telah diupayakan dengan baik, namun belum semua BKM mencapai keberhasilan.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas; Badan Keswadayaan Masyarakat

Abstract

The aim of this research is to know the developing of BKM capacity which is measured by BKM capacity developing, The method which is used in this research is research mixed method. It combining qualitative and quantitative research. The location of this research in Kecamatan Rantau Selatan. The analysis result showed that the capacity developing of 4 from 9 BKM is not optimal. Especially if it seen from the capacity developing of the institution and individual capacity. Meanwhile, the variable which most influenced the success achievement of PNPM MP realization and BKM capacity are the facilities, the leadership, and the attitudes. One of the success achievement can be seen from the economy activity in turn. This success achievement showed by BKM Maju Bersama, BKM Karya Mufakat, BKM Anugrah, BKM Sejahtera, and BKM Perdana Sejahtera. The result of this research can be concluded that the capacity developing has efforded well. In spite of, some of BKM is not reach yet the successful.

Keywords : Capacity developing; Independence committee

How to Cite: Nasrullah Hidayat, (2016). Nasrullah Hidayat, Pengembangan Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Rantau Selatan 4 (2): 120-130

*Corresponding author:

E-mail: Nasrullahidayat816@yahoo.co.id

p-ISSN-2549-9165

e-ISSN

PENDAHULUAN

Kemiskinan tumbuh sebagai bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat. Untuk memungkinkan masyarakat paling miskin bertindak, perlu ada fasilitator (para agen pembangunan) yang memiliki sumberdaya, kekuasaan, dan kemampuan untuk bertindak. Masyarakat yang paling miskin terjebak dalam situasi ketidakberdayaan karena kemiskinan ekonomi dan sosial yang ekstrim, sehingga seringkali menyempitkan, membunuh kesadaran, melemahkan, mengisolir, dan merapuhkan mereka (Chambers, 1997). Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di Indonesia seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin saat ini adalah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mengadopsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Hasil yang dicapai belum sesuai yang diharapkan, sehingga perlu melakukan review-refleksi untuk kemudian menata ulang strategi implementasi yang lebih baik. Dari aspek pelaku selama ini pelaksanaan dan penyalahgunaan dana banyak dilakukan oleh masyarakat, tetapi sekarang mulai merambah ke anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan konsultan (fasilitator kelurahan).

Berdasarkan penilaian masyarakat, BKM kurang memiliki indikator yang layak untuk dijadikan pedoman, ukuran dan kurang jeli dalam melihat kelompok masyarakat mana yang lebih diprioritaskan menerima dana bantuan langsung masyarakat dan kelompok masyarakat lain yang memberikan usulan kegiatan. Berdasarkan masalah tersebut, perlu untuk meneliti Pengembangan Kapasitas BKM Dalam PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Pertanyaannya adalah (1) Bagaimana pengembangan kapasitas BKM pada tingkat

individu dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu? (2) Bagaimana pengembangan kapasitas BKM pada tingkat organisasi dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu? Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui pada tingkat individu pengembangan kapasitas BKM dan mengetahui pada tingkat organisasi pengembangan kapasitas BKM dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*) (Creswell, 2010). Dalam metode penelitian ini metode kualitatif diutamakan terlebih dahulu, sedangkan metode kuantitatif sebagai penunjang data kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Penelitian ini menggunakan model konkuren yaitu penggabungan (*integrating*) antara keduanya dengan melakukan cross check antara hasil yang diperoleh dari metode kualitatif dengan hasil penelitian metode kuantitatif. Metode penelitian ini lebih menekankan pada satu metode tergantung dari kepentingan peneliti yang ingin diutamakan oleh peneliti.

Dalam metode penelitian ini, metode penelitian kualitatif diutamakan terlebih dahulu, sedangkan data metode penelitian kuantitatif sebagai penunjang data kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu pada tingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Rantau Selatan. Sebagai unit pengamatan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat sebanyak 9 BKM yang masing-masing BKM terdiri dari 5-11 anggota BKM. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi BKM. Ini berarti unit analisis juga mencakup anggota yang ada dalam BKM di wilayah Kecamatan Rantau Selatan sebagai lokasi penelitian.

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu data berupa hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi dan data sekunder dengan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing, tehnik yang digunakan dengan mengkomparasikan data yang diperoleh dari informan dan dokumentasi. Hasil wawancara dibuat kedalam bentuk transkrip, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama. Peneliti menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman dalam bentuk teks, kemudian dilakukan reduksi data. Kemudian melakukan analisis dengan cara koding data kualitatif, dilakukan untuk mereduksi informasi ke dalam tema dan kategori. Koding melibatkan berbagai proses pemilahan informasi, mengembangkan kategori koding, dan menciptakan kategori tema dan pola. Langkah melakukan koding menurut menurut (Moeloeng, 2008) meliputi: (1) *open coding*, melakukan koding dari hasil transkrip wawancara data lapangan ke dalam koding-koding tertentu, (2) *Axial coding*, mengkategorisasikan (3) *Open Coding* yang memiliki karakteristik yang sama dan (4) *Selective coding*, memilah *axial coding* mana yang sesuai dengan kajian teoritik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PNPM MP mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara komprehensif dan utuh. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat mandiri dan harapan. Masyarakat mandiri dalam konsep PNPM-MP adalah kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan bantuan pihak luar semata. Namun demikian, permasalahan kemiskinan tersebut hanya bisa diselesaikan

melalui upaya masyarakat itu sendiri agar mampu mentransformasikan dirinya kearah tatanan masyarakat madani yaitu masyarakat yang mampu mengurus masalahnya sendiri (*selfcommunity management*). Dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal untuk menunjang terciptanya masyarakat yang madani. Oleh sebab itu, dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang keberadaanya di dasarkan pada kebutuhan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat dan mencerminkan kepemimpinan kolektif berbasis moral dan sebagai representasi dari seluruh masyarakat warga yang dapat dipercaya. Secara umum kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Rantau Selatan yang sudah dilaksanakan di deskripsikan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan lingkungan atau pembangunan infrastruktur didukung oleh BKM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL) serta masyarakat penerima manfaat langsung yaitu masyarakat miskin dan warga sekitar. Untuk lebih jelasnya kegiatan lingkungan atau pembangunan infrastruktur yang sudah pernah dilaksanakan di tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur PNPM Tahun BLM Tahap I 2013

No	Nama BKM	Jenis Kegiatan	BLM APBN	Swadaya	Pemanfaat		Persentase	
					KK	KK Miskin	Swadaya	Pemanfaat
1	Harapan	Drainase	19.500.000	3.140.000	25	14	16%	56%
2	Karya Bersama	Rabat Beton dan Drainase	19.500.000	3.250.000	20	10	16,67%	50%
3	Maju Bersama	Rabat Beton	19.500.000	3.310.000	20	12	16,97%	60%
4	Karya Mufakat	Rabat Beton	19.500.000	3.490.000	35	20	17,89%	57,14%
5	Amanah	Drainase, Jembatan	101.000.000	12.585.000	180	90	12,46%	50%
6	Perdana Sejahtera	Rabat Beton, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah	57.000.000	6.024.000	110	55	10,56%	50%
7	Sejahtera	Drainase	19.500.000	3.565.000	30	15	18,28%	50%
8	Anugerah	Drainase	19.500.000	3.065.000	37	19	15,71%	51,35%
9	Serupama	Drainase	57.000.000	7.630.000	72	44	13,38%	61%
			JUMLAH		529	279		

Sumber : BKM Rantau selatan 2014 diolah

Tingkat keswadayaan masyarakat yang paling tinggi terdapat pada BKM Amanah sebesar Rp.12.585.000 atau sebesar 12,64 %. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya lingkungan yang ada di Kelurahan Perdamean dan setiap lingkungan memiliki KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan. Artinya dengan tingkat keswadayaan masyarakat lebih ≥ 10 % dari total dana bantuan APBN menunjukkan bahwa BKM sudah mampu memberdayakan masyarakat serta mampu untuk merangkul

masyarakat. Jika dilihat dari persentase penerima manfaat masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya sudah mencapai 90 KK miskin (50%) dari total 180 KK yang ada di BKM Amanah. Jika dilihat dari total keseluruhan masyarakat yang sudah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur ini mencapai 279 KK miskin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat progress pelaksanaan kegiatan Infrastruktur dana BLM II di Kecamatan Rantau Selatan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun BLM Tahap II 2013

No	Nama BKM	Jenis Kegiatan	BLM APBN	Swadaya	Pemanfaat		Persentase	
					KK	KK Miskin	Swadaya	Pemanfaat
1	Harapan	Drainase dan Pelatihan	40.500.000	5.870.000	30	20	14,5%	66%
2	Karya Bersama	Jalan rabat beton dan pelatihan	40.500.000	5.900.000	25	18	14,56%	72%
3	Maju	Drainase dan	40.500.000	6.600.000	35	13	16,29%	37%

	Bersama	pelatihan						
4	Karya Mufakat	Jalan rabat beton dan pelatihan	40.500.000	6.350.000	37	15	3,11%	40,54%
5	Amanah	Dranase (4) dan pelatihan	204.000.000	34.435.000	187	113	29,95%	60,42%
6	Perdana Sejahtera	Drainase (3) dan pelatihan	115.000.000	17.565.000	210	105	15,27%	50%
7	Sejahtera	Drainase dan pelatihan	40.500.000	6.485.000	30	25	16%	83%
8	Anugerah	Drainase dan pelatihan	40.500.000	4.835.000	37	19	4,18%	51%
9	Serupama	Drainase (2) dan rabat beton	115.500.000	15.419.000	106	65	13,35%	61%
	Jumlah		677.500.000	103.459.000	660	393		

Sumber : BKM Rantau selatan 2014, diolah

Perkembangan tingkat keswadayaan BKM Amanah pada BLM II sebesar 29,9 % atau sekitar Rp. 34.435.000. Jika dibandingkan dengan kegiatan BLM I di kegiatan BLM II ini tingkat keswadayaan BKM Amanah meningkat sebesar 17,44%. Hal ini menunjukkan bahwa BKM Amanah sudah mampu meningkatkan kapasitasnya dalam merangkul masyarakat, memberdayakan dan bersosialisasi kepada masyarakat. Jika dilihat dari persentase masyarakat penerima manfaat yang merasakan dampaknya sudah mencapai 90 KK miskin (50%) dari total 180 KK yang ada di BKM Amanah. Dari total keseluruhan masyarakat yang sudah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur dan pelatihan di Kecamatan Rantau Selatan di BLM tahap II ini mencapai 393 KK. Jadi, total keseluruhan total penerima manfaat atau KK miskin sampai pada tahap BLM II secara keseluruhan sebanyak 672 KK miskin.

BKM yang memiliki penerima manfaatnya sangat sedikit adalah BKM Karya Bersama sebanyak 13 KK miskin dari total 37 KK atau sebesar 37%. Besar dana yang di dapat dari BLM II ini adalah sebesar Rp. 40.500.000 dan swadaya masyarakat sebesar Rp.6.600.000 atau 16,29%. Dalam artian tingkat keswadayaan masyarakat di BKM Karya Bersama berjalan dengan baik walaupun dari segi penerima manfaat hanya sedikit. Hal tersebut tidak mempengaruhi semangat partisipasi masyarakat untuk saling bergotong-royong karena kemampuan BKM dalam memberikan sosialisasi, pemahaman

dan pemberdayaan kepada masyarakat. Permasalahan ekonomi warga di Kecamatan Rantau Selatan berkaitan modal dan pendapatan yang rendah. Permasalahan pada modal berkaitan dengan permasalahan pedagang di tiap kelurahan karena kekurangan modal usaha. Selain permasalahan kekurangan modal masyarakat juga mempunyai masalah dengan pendapatan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak punya sumber usaha karena sumber daya manusianya sangat rendah, pekerjaannya tidak menentu dan tidak punya keahlian/keterampilan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kedua hal tersebut adalah dengan melaksanakan pinjaman bergulir dari dana BLM PNPM MP. Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. Kegiatan ekonomi bergulir tidak berjalan dengan baik dan sesuai prosedur karena dana yang ingin digulirkan mengalami kemacetan bahkan gagal pelaksanaannya.

Kegagalan tersebut bukan karena ketidakjujuran yang dilakukan oleh anggota BKM tetapi tidak adanya transparansi dan akuntabilitas BKM yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan ekonomi dan tidak adanya konfirmasi kepada Unit Pengelola Keuangan. Tingkat pengembalian pinjaman

bergulir BKM memiliki kriteria tertentu yang pelaksanaannya seperti pada Tabel 3. menunjukkan keberhasilan dalam

Tabel 3. Tingkat Pengembalian Pinjaman bergulir di Kecamatan Rantau Selatan Tahun 2012

No.	Nama Kelurahan	Nama BKM	Alokasi Dana	Kriteria
1	Ujung Bandar	Harapan	80.000.000	$\geq 20\%$
2	Bakaranbatu	Karya Bersama	90.000.000	$\geq 20\%$
3	Urung Kompas	Maju Bersama	80.000.000	$< 10\%$
4	Sioldengan	Karya Mufakat	80.000.000	$< 10\%$
5	Perdamean	Amanah	80.000.000	$\geq 20\%$
6	Sigambal	Perdana Sejahtera	80.000.000	$< 10\%$
7	Danau Bale	Sejahtera	100.000.000	$10\% \leq \text{PAR} < 20\%$
8	Sidorejo	Anugerah	80.000.000	$10\% \leq \text{PAR} < 20\%$
9	Lobusona	Serupama	80.000.000	$\geq 20\%$

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BKM Rantau Selatan diolah, 2014

Kinerja pinjaman bergulir (PAR) yang dicapai kriteria di $< 20\%$, UPK hanya diperkenankan melayani peminjam (KSM) lama yang pengembaliannya lancar. Hal tersebut dapat ditemukan di BKM Amanah, BKM Karya Bersama, BKM Harapan dan BKM Serupama pinjaman beresikonya $\geq 20\%$ artinya BKM mengalami masalah dalam tingkat pengembalian pinjaman oleh KSM dan menunggak. Untuk resiko peminjaman $10\% \leq \text{PAR} < 20\%$ adalah BKM Sejahtera dan BKM Anugerah, sedang untuk BKM yang resiko peminjaman $\geq 20\%$ dan kegiatannya sudah tidak berjalan lagi adalah BKM Harapan, BKM Bakaranbatu, BKM Amanah dan BKM Serupama.

Dalam kegiatan sosial, fungsi BKM diarahkan untuk menggali berbagai potensi sumberdaya masyarakat dan menggalang aneka sumberdaya luar. BKM beserta UP-UP berperan dalam menggali aksesibilitas seluas-luasnya, sehingga KSM sosial sebagai pengelola kegiatan terhindar dari sifat instan, karitatif (charity), temporer, dan insidental. Dukungan sumberdaya diharapkan muncul dari dinas-dinas Pemda dan kelompok peduli (elemen Perguruan Tinggi, Swasta dan Ornop), sedangkan BLM berfungsi sebagai

dana stimulan. Kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM/kepanitiaan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan sunat massal untuk anak-anak, pemberian sembako murah, santunan warga jompo dan pelatihan pembuatan bunga dari bahan akrilik. Dari kegiatan sosial tersebut yang masih berkembang dan berjalan sampai dengan saat ini adalah kegiatan pelatihan keterampilan pembuatan bunga akrilik. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Rantau Selatan masih ada yang dapat menjaga keswadayaan, partisipasi, kemanfaatan, produktivitas dan keberlanjutan dana sosial, sehingga terhindar dari bentuk kegiatan yang karitatif dan instan yang kontraproduktif terhadap spirit pemberdayaan. Untuk satu jenis kegiatan sosial dana yang di alokasikan dari APBN sebesar Rp. 15.000.000, sedangkan besar swadaya masyarakat sebesar Rp. 3.645.000.000. Jadi total keseluruhan untuk kegiatan sunat massal dan santunan adalah 18.645.000.

Tinjauan mengenai pengetahuan BKM terhadap tugas dan fungsinya dilihat pada sumber daya yang dimiliki BKM meliputi pendidikan dan skill pengurus BKM dalam melaksanakan kegiatan Tridaya (kegiatan lingkungan, kegiatan sosial dan kegiatan

ekonomi. Secara umum pendidikan, skill dan pengalaman berorganisasi yang dimiliki para pengurus BKM cukup memadai rata-rata pengurus berpendidikan SLTA. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2003) pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi dapat juga diperoleh pada pendidikan informal.

Selain itu, pengalaman juga mempengaruhi pengetahuan seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoadmodjo (2003) pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. BKM yang memiliki pengalaman organisasi di Kecamatan Rantau Selatan ini hanya 4 dari 9 BKM.

Keberhasilan seorang anggota BKM juga ditentukan oleh perilaku dan etika kerja. Permasalahan etika dan perilaku anggota BKM di Kecamatan Rantau Selatan terkait dengan tingkat kehadiran dan partisipasi anggota yang belum teratasi sampai saat ini. Menurunnya tingkat kehadiran BKM ini terus-menerus terjadi karena disengaja dan ada yang benar-benar berhalangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota BKM tidak dibebankan jam kerja tetapi sifatnya purna waktu dan sehingga membuka kesempatan untuk anggota BKM tidak ikut hadir. Sesuai dengan hasil temuan di lapangan seperti BKM Amanah, BKM Harapan dan BKM Karya Bersama perlu di tekankan disiplin korektif mengingat masalah tingkat kehadiran dan tanggungjawab menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota BKM belum optimal.

Keahlian dan keterampilan BKM mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Pelatihan yang dilakukan dalam PNPM secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang terkait dengan siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait dengan siklus diantaranya pelatihan refleksi kemiskinan, pelatihan dasar relawan, pelatihan pemetaan swadaya, pelatihan penyusunan PJM Pronangkis, pelatihan praturgas BKM, pelatihan BKM, pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan utama dan kegiatan-kegiatan pelatihan lain yang mendukung berjalannya siklus pemberdayaan.

Pelatihan yang dilaksanakan yang tidak terkait langsung dengan siklus diantaranya pelatihan pembuatan media warga, pelatihan manajemen penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pelatihan pengembangan data dan informasi komunitas, pelatihan UPK, pelatihan UPS, pelatihan UPL, pelatihan Kades, dan pelatihan-pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya. Pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya dilakukan oleh BKM sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki keahlian dan keterampilan. Melalui pemahaman seseorang dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif dan menjadi seseorang yang kreatif dan menjadi efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan serta berpotensi.

Sesuai dengan pendapatnya Samsudin (2006) bahwa pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan seseorang yang sudah menduduki jabatan atau tugas tertentu. Apapun jenis pelatihan dan tingkatannya pada hakikatnya akan menuju pada suatu perubahan perilaku baik secara individu maupun kelompok. Hal demikian juga yang sudah dilakukan 2 dari 9 BKM di Kecamatan Rantau Selatan.

Sarana dan prasarana BKM yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) PNPM MP. Menurut pendapat Syahril (2005) sarana dan prasarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki sebagian BKM di Kecamatan Rantau Selatan adalah fasilitas-fasilitas dan perlengkapannya seperti sekretariat, peralatan dan perlengkapan komputer. Dari hasil temuan di lapangan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh BKM menunjukkan hanya 2 dari 9 BKM memiliki perlengkapan kantor dan sekretariat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Warakasih (2001) di Kabupaten Gunung Kidul yang menggunakan variabel sarana dan prasarana. Di dalam penelitiannya menjelaskan pada umumnya BKM memakai atau meminjam ruang pada kantor/desa seperti peralatan kantor (meja, kursi, dan mesin ketik). Sebagian BKM juga masih menggunakan rumah pengurus sebagai kantor karena pertimbangan lokasinya strategis (pinggir jalan atau mudah dijangkau) seperti di BKM Kampung. Pengembangan sarana prasarana diterapkan secara berkala oleh BKM di Kecamatan Rantau Selatan tetapi hanya 2 BKM yang mampu untuk melaksanakannya yaitu BKM Anugerah dan BKM Maju Bersama. Adapun sarana dan prasarana tersebut seperti ruang rapat dengan warga, posyandu, lemari, alat-alat kantor dan komputer, sedangkan BKM Anugerah sarana dan prasarana yang dimiliki hanya berupa peralatan kantor, komputer, lemari, kursi dan meja-meja pertemuan.

Kapasitas keuangan yang dimiliki BKM yaitu laporan keuangan, sumber dana, rencana keuangan dan anggaran biaya kegiatan. Sumber daya keuangan dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengalokasian anggaran, hingga

pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan sangat membantu setiap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai program dan kegiatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rencana kerja masing-masing satker yang mengacu pada RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) BKM itu sendiri.

Sumber daya keuangan BKM diperoleh dari APBN dan APBD disalurkan melalui BLM untuk kegiatan lingkungan ekonomi, kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan. Sumber keuangan yang lain diperoleh dari keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya pinjaman bergulir. BKM yang memiliki tingkat pengembalian lancar diberikan reward berupa dana tambahan seperti dana PAKET (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu). Disamping itu sebanyak 5 BKM memiliki dana bergulir dan anggotanya aktif melakukan pinjaman bergulir sedangkan 4 BKM memiliki dana bergulir tetapi anggotanya tidak aktif melakukan pinjaman bergulir (vakum dan macet total).

Kedua tingkatan sumberdaya BKM menyebabkan terjadinya perbedaan pengembangan kapasitas yaitu (1) memiliki dana bergulir dan anggota aktif melakukan pinjaman bergulir kepemilikan dana bergulir dalam BKM yang anggotanya aktif melakukan pinjaman bergulir dianggap sangat baik karena dengan keadaan demikian menunjukkan bahwa BKM yang memiliki dana bergulir dapat membantu masyarakat yang termasuk dalam penerima manfaat/ rumah tangga miskin, selain itu keaktifan anggota BKM dalam melakukan pinjaman bergulir yang ada lebih banyak membantu keperluan rumah tangga miskin dalam meningkatkan usaha, (2) memiliki dana bergulir tetapi anggota BKM tidak aktif melakukan pinjaman bergulir. BKM yang tidak aktif melakukan pinjaman bergulir dianggap kurang baik karena mengakibatkan tidak berkembangnya keadaan usaha dan pendapatan masyarakat. Apabila ada rumah

tangga miskin yang memerlukan bantuan dana tidak bisa untuk digulirkan.

Ketatalaksanaan dalam PNPM MP merupakan elemen pendayagunaan BKM dalam menggerakkan jalannya organisasi kelembagaan. Dalam sistem ketatalaksanaan mencakup proses pedoman umum standar operasi, mekanisme, tata kerja, hubungan kerja dan prosedur pada tingkat perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pengelolaan, administrasi umum, keuangan, perlengkapan, pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kearsipan, efisiensi dan tentang pengaturan budaya kerja. Namun demikian, saat ini kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan PNPM MP di Kecamatan Rantau Selatan masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien, efektif, sehingga perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan tata kerja agar menjadi makin tertib dan efektif.

Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) dalam penelitian ini terdiri atas kapasitas prosedur kegiatan, pengambilan keputusan, kapasitas pembagian tugas, menentukan prioritas dan kemendesakan penerima manfaat, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengembangan struktur organisasi dan pengembangan kapasitas dalam bekerjasama/*berchanelling*. Oleh karena itu, setiap kelurahan disarankan melakukan perbaikan proses operasional dengan menyusun prosedur kerja dan dapat mensosialisasikannya kepada seluruh anggota BKM. Sosialisasi ini tidak sekedar menjadi pedoman bagi anggota BKM untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, tetapi juga memberikan panduan dalam memberikan pemberdayaan yang berkualitas kepada masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Abdusyani (1994) ciri-ciri organisasi sosial yaitu (1) mempunyai rumusan batasan-batasan operasional (organisasi) jelas artinya terdapat

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kepentingan bersama, (2) memiliki identitas yang jelas biasanya bersifat kolektif dan disesuaikan dengan unsur informasi mengenai organisasi, tujuan khusus pembentukan organisasi, tempat organisasi, (3) anggotanya ditetapkan secara formal, penjabaran tugas dinyatakan secara tertulis dan terperinci untuk menghindari tugas yang tumpang tindih. Sesuai dengan pendapat di atas BKM Kecamatan Rantau Selatan merupakan organisasi sosial yang bersifat formal karena mempunyai maksud dan tujuan yang jelas sesuai yang tercantum dalam anggaran dasarnya yaitu untuk membangun kehidupan masyarakat mandiri yang mampu menanggulangi kemiskinan di lingkungannya.

Kepemimpinan yang efektif sangat mempengaruhi keberhasilan PNPM MP dan anggota organisasi untuk pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Di samping berperan penting dalam menetapkan visi dan misi, pemimpin memotivasi dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan umpan balik yang membangun kepada masyarakat yang lain. BKM Rantau Selatan tidak memilih seorang ketua sebagai pimpinan BKM tetapi mengangkat seorang Koordinator BKM yang mewakili anggota BKM. Koordinator bertugas mengkoordinir anggota dan memberikan dukungan timbal balik dengan mengakui prestasi anggota tim, mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja, berusaha mempertahankan komitmen melalui penegasan anggaran dasar yang telah disepakati bersama.

Aspek yang dilihat dari keberhasilan kordinator BKM adalah demokratisasi dan sistem pengambilan keputusan. Selain itu terselenggaranya sistem manajemen yang baik dan demokratis diukur dengan perumusan kegiatan dan pelaksanaan program penganggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang terjadi BKM tidak mampu menjalankan praktek kepemimpinan yang efektif, jujur, tanggungjawab serta tidak adanya komitmen

dan keseriusan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya pergantian kordinator karena bermasalah seperti kordinator BKM Amanah yang saat ini baru menjabat selama satu tahun karena kordinator sebelumnya melakukan penyelewangan dana BLM.

Selain itu BKM Harapan juga mengalami hal yang sama melakukan pergantian kordinator dan baru berjalan satu tahun dengan alasan kordinator BKM yang lama sudah tidak mampu menarik dana yang digulirkan dan mengundurkan diri. Berbeda dengan BKM Karya Bersama yang sudah melakukan pergantian kordiantor selama 3 tahun terakhir dengan alasan kordinator BKM tidak demokratis dan bertanggungjawab. Kebiasaan negatif ini salah satunya tingkat kehadirana di saat rapat tidak pernah meluangkan waktu walaupun diundang dan merangkap jabatan. Kordinator melakukan sendiri penarikan dana bergulir yang seharusnya dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Sikap kordinator memperlihatkan adanya kesempatan melakukan penyelewangan dana penurunan sikap kerelawanan yang telah dibina. Hasil analisis di atas sesuai dengan pendapat Robbins (1994) bahwa gaya kepemimpinan yang dimiliki ketiga BKM tersebut yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Gaya otokratis dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang berdasar pada kekuatan posisi dan penggunaan otoritas pemimpin yang level analisisnya terfokus pada hubungan antara pemimpin dengan kelompok pengikut kolektif. BKM yang memiliki kemampuan menjalankan praktek kepemimpinan yang efektif, jujur, tanggungjawab serta komitmen dalam menjalankan tugasnya adalah BKM Maju Bersama, BKM Serupama, BKM Anugerah, BKM Sejahtera dan BKM Perdana Sejahtera ditinjau dari peranan kordinator BKM. Kemampuan kordinator BKM dalam menjalankan praktek kepemimpinannya dengan baik adalah mampu melakukan

pendekatan dengan masyarakat, peduli dengan masyarakat dan bersikap demokratis dalam mengambil keputusan bersama.

SIMPULAN

Pada tingkat individu terutama pada pengetahuan anggota BKM terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki BKM melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sedangkan non formal yaitu pengalaman berorganisasi diluar BKM. Selain itu, kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki anggota BKM menyebabkan proses melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat belum optimal. Pengembangan kapasitas lainnya adalah perilaku dan etika BKM yang dinilai berdasarkan tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran dan partisipasi warga saat diadakan rembug tahunan bersama masyarakat dan anggota BKM yang paling tinggi sebesar 78%. Sementara tingkat kehadiran dan partisipasi yang terendah sebesar 40%. Pada tingkat organisasi, kapasitas sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki BKM dalam pelaksanaan PNPM MP di kecamatan Rantau Selatan adalah sekretariat, peralatan dan perlengkapan komputer. Namun demikian, belum semua BKM mampu melaksanakannya. BKM yang tidak memiliki perlengkapan kantor dan sekretariat ada 7 BKM (77%), sedangkan untuk BKM yang memiliki sekretariat dan perlengkapan kantor dan komputer sebanyak 2 BKM (23%). Dilihat fasilitas yang dimiliki BKM merupakan indikator yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas BKM. Sebagian BKM tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan tidak memiliki kantor sekretariat. Selain itu pada tingkat organisasi, keberhasilan BKM dinilai dari kegiatan ekonomi khususnya pinjaman bergulir.

Penilaian yang dilakukan berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian dana pinjaman yang digulirkan kepada masyarakat. Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan

fungsi BKM ditentukan dengan berjalannya proses operasional untuk setiap jenis kegiatan. Agar pencapaian tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka prosedur kegiatan harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Kepemimpinan BKM di Kecamatan Rantau Selatan masih ada yang bersifat otokratis. Hal ini dapat dilihat dari pergantian kordinator BKM, dimana pemimpin yang tidak memberi teladan yang baik, melemahkan kepemimpinannya terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Gunungkidul”, Tesis : Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, S., 1994, Sosiologi skematika, teori dan terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Chambers, R., 1997, *Whose Really Counts? Putting The First Last*, London: Intermediate Technology Publication.
- Cresswell, J.W., 2010, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: Sage Publication
- GTZ , 2005, *Support for Decentralization Measures (SfDM)*, Jakarta: GTZ.
- Hamdani, H., 2008, “Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Antropologi* Vol. no. 3: 1-6.
- Moleong,L.,2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda
- Notoadmojo, S.,2003, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbin, S.,1994, *Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Arcan.
- Samsudin, S., 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Pustaka Setia
- Syahril, H., 2005, *Manajemen Sarana dan Prasarana*, Padang : UNP PRESS.
- Warakasih, I., 2001, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kabupaten